

Katalog: 4601007.12
ISSN 2620-5696

PROFIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

2023

Volume 8, 2024

<https://sumut.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

Katalog: 4601007.12
ISSN 2620-5696

PROFIL
INDEKS
DEMOKRASI
INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
2023
Volume 8, 2024

Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara 2023

Volume 8, 2024

Katalog	: 4601007.12
ISSN	: 2620-5696
Nomor Publikasi	: 12000.24048
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman	: xii+48 Halaman
Penyusun Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Penerbit	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

TIM PENYUSUN

PROFIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA 2023

VOLUME 8, 2024

Pengarah
Asim Saputra

Penanggung Jawab
Dadan Supriadi

Penyunting
Cahyono Panca Aridesyadi

Pengolah Data dan Penulis Naskah
Dahril Iskandar

Penata Letak
Prio Arif Budiman
Adelina Octavia Sihombing

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Publikasi Profil Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara 2023. Buku ini adalah terbitan ketiga dalam pengukuran IDI metode baru, sekaligus publikasi kedelapan sejak publikasi Profil IDI Sumatera Utara diterbitkan pertama kali pada Tahun 2017.

IDI merupakan alat ukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan masyarakat dengan mengandalkan pada data empiris, mendasarkan pada peristiwa yang diamati dan terukur. IDI 2023 mencatat peristiwa dan perilaku berdemokrasi sepanjang tahun 2023. Publikasi Profil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara 2023 mencakup data hasil penghitungan IDI tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan metode baru. Publikasi buku ini menjadi penting karena menandai pengukuran tingkat perkembangan demokrasi Indonesia di tengah tantangan global yang makin kompleks sekaligus tantangan demokrasi di tanah air.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada kementerian/lembaga/dinas/instansi dan berbagai kalangan yang telah membantu dalam proses penyusunan IDI 2023. Semoga bermanfaat untuk penguatan demokrasi di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, September 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara



Asim Saputra

DAFTAR ISI
Profil Indeks Demokrasi Indonesia
Provinsi Sumatera Utara 2023
Volume 8, 2024

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1 Pendahuluan	1
1.1 Landasan Konseptual	3
1.2 Indeks Demokrasi Indonesia (Metode Baru)	4
1.3 Metode Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia	15
1.4 Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	22
2 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara	23
2.1 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara, 2021-2023	25
2.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2021-2023 ...	25
2.3 Capaian Skor Indikator IDI Sumatera Utara 2023	31
2.4 Perubahan Indeks Indikator pada Indeks Demokrasi IDI Sumatera Utara 2022-2023	35
3 Perbandingan Angka IDI	39
Daftar Pustaka	43
Lampiran	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia	12
2 Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia	13
3 Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia	14
4 Peserta <i>Focus Group Discussion</i> IDI	18
5 Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia	19
6 Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	22
7 Indeks Indikator IDI Sumatera Utara, 2023	27
8 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Tinggi, 2023	33
9 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Sedang, 2023	34
10 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Rendah, 2023	34
11 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Naik	36
12 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Turun	37
13 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Tetap	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru 11
Gambar 2	Skema Penyusunan IDI 15
Gambar 3	Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2021–2023 25
Gambar 4	Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2021–2023 26
Gambar 5	Nilai Indeks pada Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2022 dan 2023 27
Gambar 6	Perubahan Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2022–2023 27
Gambar 7	Nilai Indeks pada Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2022–2023 28
Gambar 8	Perubahan Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021– 2022 29
Gambar 9	Nilai Indeks pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara, 2022–2023 30
Gambar 10	Perubahan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara, 2022–2023 30
Gambar 11	Indeks Indikator IDI Sumatera Utara 2023 31
Gambar 12	Nilai Perubahan Indikator IDI Sumatera Utara (poin), 2022–2023.. 35

1

Pendahuluan

<https://komut.bps.go.id>

1.1 LANDASAN KONSEPTUAL

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan tingkat keragaman yang besar pula, apakah itu dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, konflik komunal, dan lain-lain. Karena itu, menjadi sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu, dan kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor tersebut untuk pembuatan rencana pembangunan politik dan demokrasi di semua provinsi dan juga kabupaten/kota di Indonesia.

Awalnya Indonesia dinilai oleh dunia sebagai sebuah negara demokrasi, sejak *Freedom House* (2008), memasukan Indonesia ke dalam kelompok negara-negara “bebas secara penuh” di dunia, didasarkan atas “indeks kebebasan”.

Dalam konteks itulah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi krusial, sebagai alat ukur empirik dan sederhana untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di tanah air. Untuk tujuan itu maka menjadi sangat fundamental memahami apa yang dimaksud dengan “demokrasi” itu sendiri. Dari pengertian atau definisi ini, kemudian dapat diturunkan dimensi-dimensinya, kemudian variabel-variabel dan indikator-indikatornya. Dengan teknik pembuatan indeks dari indikator-indikator itu akan terbentuk IDI yang dapat diturunkan hingga tingkat provinsi di tanah air.

Untuk itulah mulai tahun 2009 BPS mulai menghitung ukuran demokrasi, yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada pada kultur dari bangsa Indonesia ini sendiri. Pemerintah Indonesia melakukan pengukuran terhadap demokrasi secara berkala dengan merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) setiap tahun sejak 2009. IDI mengukur dinamika perkembangan demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. IDI menghasilkan skor yang merujuk pada tiga kategori, yaitu rendah (nilai indeks kurang dari 60), sedang (nilai indeks 60-80), dan tinggi (nilai indeks di atas 80).

1.2 INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (METODE BARU)

Penerapan Metode Baru dalam pengukuran IDI perlu dipahami agar dapat diketahui asal-usul dan proses yang telah dilalui dalam menyempurnakan metode pengukuran IDI. Dengan demikian, akan mengetahui perbedaan-perbedaan apa saja antara metode lama dan metode baru.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan instrumen yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, dan telah digunakan oleh pemerintah pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, serta 2020–2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pemerintah Daerah. IDI pertama kali dihitung BPS pada 2009 dan pada buku ini mengulas hasil pengukuran IDI yang terkini. Dalam perjalanan penghitungan IDI tersebut, dijumpai beberapa indikator tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan. Selain itu, berbagai kalangan telah sejak lama memberikan saran dan masukan agar IDI disempurnakan. Sekalipun demikian, perubahan dimaksud memang tidak serta-merta dapat dilakukan dalam waktu singkat karena diperlukan proses yang tidak sederhana untuk melakukan kajian revisi, agar hasilnya bisa lebih baik dari metode yang sudah ada.

Pada tahun 2018, Bappenas mulai menginisiasi revisi IDI yang dilakukan secara kolaboratif oleh tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu; pertama tahapan Kajian Literatur (Mei–Juli 2018), kedua tahapan Operasionalisasi Konsep (Agustus–September 2018), dan ketiga tahapan Uji Coba (September–November 2018). Uji coba pengumpulan data dilakukan pada empat wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Maluku. Pada akhir tahun 2018 telah dihasilkan dokumen Laporan Akhir Revisi Indeks Demokrasi Indonesia, yang secara komprehensif memasukkan segala aspek penting yang dapat menjadi acuan Revisi IDI Metode Baru: perubahan teori, usulan indikator, hingga cara penghitungan. Urgensi revisi IDI berdasarkan kajian tersebut paling kurang memuat empat hal. **Pertama**, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. Basis teoretik dan konseptual

tersebut diharapkan mampu dioperasionalkan untuk memberikan arah bagi pembangunan politik dan arah perubahan demokrasi di Indonesia. Untuk itu IDI perlu memiliki ukuran-ukuran kebaikan demokrasi yang dituju sehingga tujuan dan arah perubahan yang diharapkan menjadi jelas dan terukur. IDI tidak hanya sekadar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komprehensif. IDI saat ini hanya mengukur unit analisis di tingkat provinsi, sementara hasil skor nasional adalah hasil agregasi dari skor provinsi. Hal ini cukup problematik karena tidak dilakukannya pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.

Ketiga, konsep demokrasi dalam IDI saat ini masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negaranegara pasca otoritarianisme seperti halnya Indonesia perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial budaya. Ketimpangan akses dan distribusi sumber daya ekonomi juga merupakan problem demokrasi, begitu pun juga hadir dan bekerjanya kekuatan oligarki dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia adalah hambatan bagi demokrasi karena adanya monopoli dan konsentrasi sumber daya.

Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada, memetakan berbagai indeks-indeks demokrasi sebagai referensi dan pembanding. Seluruh hal yang menjadi urgensi revisi tersebut telah dirancang pada hasil kajian yang dihasilkan konsorsium lembaga riset tersebut. Oleh karenanya naskah akademik ini akan menggunakan hasil tersebut sebagai rujukan utama, sekaligus fokus untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Kondisi ini merupakan keniscayaan mengingat konsorsium hanya memiliki waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dari Mei–Desember 2018 untuk menyelesaikan kajian. Oleh karenanya berbagai hal teknis seperti pemeriksaan ketersediaan data indikator, penyiapan instrumen, serta teknis penghitungan belum dieksplorasi terlalu mendalam.

Di luar empat urgensi utama yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa persoalan teknis selama 12 tahun melakukan pengukuran IDI. Persoalan ini muncul saat pelaksanaan FGD, Wawancara Mendalam, maupun dari pemerintah daerah dan kementerian di tingkat pusat. Persoalan-persoalan tersebut dapat dirinci menjadi **lima** bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Peninjauan Ulang terhadap Indikator IDI

Beberapa indikator dinilai lemah, tidak lagi relevan, atau memiliki konsep yang paradoks sehingga perlu ditinjau ulang. Secara rinci indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

- a. Indikator 11 Hak Memilih dan Dipilih Terhambat, dan Indikator 13 Kualitas DPT (Daftar Pemilih Tetap). Dua indikator ini beririsan karena mengukur hal yang sebenarnya saling berkaitan. Indikator 13 mengukur seberapa banyak pemilih tidak terdaftar di DPT. Caranya dengan menghitung persentase DPK (Daftar Pemilih Khusus) terhadap total DPT, DPTb, dan DPK. Angka ini yang digunakan untuk menilai kualitas DPT yang ada di masing-masing provinsi. Pada indikator 11 salah satu yang diukur adalah hak memilih, di mana kejadian-kejadian tersebut berasal dari persoalan yang sama yang telah dicatat di indikator 13, yaitu karena tidak masuk dalam DPT. Sebagai contoh kasus di indikator 11, terdapat pemilih yang masuk DPK (karena tidak terdaftar di DPT) kehabisan surat suara karena baru boleh memilih di atas pukul 12.00. Dalam contoh tersebut persoalan tidak terdaftar di DPT akan terhitung pada dua indikator.
- b. Indikator 14 Voters Turnout. Indikator ini dinilai tidak memiliki signifikansi untuk menjelaskan demokrasi. Dalam era demokrasi memilih dalam pemilu adalah hak, sehingga tidak memilih adalah sikap politik yang tidak bisa dibilang anti-demokrasi. Pengecualian jika tidak menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar atau karena faktor teknis dalam penyelenggaraannya. Namun untuk persoalan demikian sudah tercatat di indikator 11 dan 13 sebagaimana diulas sebelumnya.
- c. Indikator 17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Indikator ini mengukur pengaduan/kritik masyarakat kepada pemerintah di lingkup provinsi. Semakin banyak pengaduan/kritik maka semakin tinggi partisipasi, yang maknanya semakin tinggi skor indikator ini. Pengaduan/kritik dalam hal ini bisa disampaikan melalui beragam cara, misalnya dari media massa, penyampaian langsung,

Ombudsman, website aduan, atau melalui demonstrasi. Cara pengukuran ini mendapat kritik dari pemerintah daerah karena dinilai paradoks. Di satu sisi mereka diminta responsif terhadap tuntutan masyarakat dan memperbaiki pelayanan publik, namun di sisi lain semakin banyak keluhan/kritik dinilai sebagai hal positif dalam IDI. Pemerintah daerah umumnya tidak melihat ada hambatan bagi masyarakat untuk mengeluhkan pelayanan publik, sehingga mengukur jumlah pengaduan sebagai hal positif dinilai kurang tepat. Penilaian ini bisa dikonfirmasi dari data yang dikumpulkan IDI. Sebagai contoh, dari sekitar 28 ribu kasus yang dihitung dalam IDI 2020, lebih dari 27 ribu di antaranya adalah kasus indikator 17.

- d. Indikator 24 Persentase perempuan pengurus partai politik. Secara nasional ini sudah mandat UU, sehingga ketentuan minimal 30 persen hampir pasti terlampaui. Di level provinsi kondisinya serupa, sebagaimana data IDI tiga tahun sebelumnya, skor indikator ini sudah mendekati ideal yaitu sebesar 98,76 (2018), 99,07 (2019), dan 98,62 (2020). Ini adalah capaian positif karena perempuan bukan hanya disediakan ruang tetapi juga mengambil kesempatan untuk berkiprah dalam partai politik. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa secara substansi ukuran tersebut sudah melembaga di dalam partai politik sehingga tidak perlu lagi dijadikan ukuran. Secara teknis indikator dengan capaian yang hampir maksimal juga tidak memiliki discriminating power untuk membedakan kualitas satu wilayah dengan lainnya.
- e. Indikator 27 Keputusan hakim yang kontroversial dan Indikator 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Kedua indikator ini dikritik karena menjadikan opini masyarakat sebagai ukuran mutlak kualitas penegakan hukum. Sebuah putusan hakim atau SP3 kepolisian akan dianggap kontroversial ketika dikritik masyarakat, melalui demonstrasi, atau opini akademisi. Kritik dari masyarakat tentu sah saja, namun jika digunakan untuk menilai variabel “Peran peradilan yang independen” akan menimbulkan resistensi. Aparat penegak hukum seringkali mempertanyakan kedua indikator ini karena sebuah putusan bisa dikoreksi dengan mekanisme banding atau praperadilan.

2. Peninjauan Ulang terhadap Bobot Aspek, Variabel, dan Indikator

Bobot dalam IDI menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dari 14 Juri yang berasal dari berbagai kalangan (akademisi, TNI, pemerintah, LSM, pers, lembaga kajian, dan politisi). Masing-masing juri diminta memberi bobot berdasarkan tingkat kepentingan secara berjenjang, dari aspek, variabel, hingga indikator. Dari hasil tersebut pada level aspek diperoleh bobot yang cukup merata, yaitu 0,327 untuk Aspek Kebebasan Sipil, 0,413 untuk aspek Hak-Hak Politik, serta 0,260 untuk Aspek Lembaga Demokrasi. Dalam AHP penilaian didasarkan atas tingkat kepentingan, namun jika diperoleh angka yang sangat ekstrem perlu ditinjau lagi *consistency ratio*-nya. Persoalan bobot ini bisa dilihat pada variabelvariabel dalam aspek kebebasan sipil, yang terdapat perbedaan ekstrem pada bobotnya, yaitu; kebebasan berkumpul dan berserikat (0,084), kebebasan berpendapat (0,093), kebebasan berkeyakinan (0,584), dan kebebasan dari diskriminasi (0,239). Hampir 60 persen indeks pada variabel ini ditentukan oleh aspek kebebasan berkeyakinan, sementara aspek kebebasan berpendapat hanya memiliki share kurang dari 10 persen. Implikasinya, kasus-kasus hambatan kebebasan berpendapat tidak akan berpengaruh banyak pada skor indeks aspek karena bobotnya yang sangat kecil. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, data IDI menunjukkan kasus hambatan kebebasan berpendapat merupakan yang paling tinggi frekuensinya di aspek ini. Kondisi ini merupakan implikasi pembobotan menggunakan AHP, sehingga subyektifitas juri yang akan menentukan. Namun pada saat yang sama subyektifitas ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks waktu di mana penjurian dilakukan. Pada masa 2007–2009 di mana bobot ini disusun, kebebasan berkeyakinan dinilai sebagai persoalan yang sangat krusial sehingga mendapat bobot yang sangat besar. Dalam perjalanan waktu, penilaian ini bisa saja tidak relevan lagi karena pandangan pada persoalan-persoalan demokrasi sudah bergeser.

3. Pertimbangan Besaran Magnitude/Lingkup Kejadian

Sebagian besar data IDI dihitung dari jumlah kasus/kejadian. Selama ini terdapat kritik karena kasus yang terjadi di seluruh provinsi dihitung dengan nilai sama. Di sisi lain antar provinsi memiliki probabilitas kasus berbeda yang disebabkan perbedaan jumlah penduduk atau pemerintah daerah. Sebagai contoh di aspek kebebasan sipil terdapat empat indikator

yang menghitung jumlah ancaman atau hambatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dengan indikator ini maka provinsi yang memiliki pemda banyak akan memiliki peluang kejadian lebih besar dibanding yang sedikit. Kondisi serupa juga terjadi pada indikator-indikator terkait pelanggaran pemilu, serta yang menghitung aturan tertulis (kebijakan) pemerintah daerah. Selain itu terkait aturan tertulis selama ini juga tidak dihitung dampaknya, artinya aturan pada level provinsi dan tingkat desa dihitung dengan nilai yang sama. Masukan yang selama ini muncul agar setiap kasus yang muncul diperhitungkan terhadap populasinya agar memperoleh penghitungan yang lebih adil.

4. Adanya Data IDI yang Under Coverage (tidak optimal)

Data IDI selama ini ditopang oleh review koran dengan oplah terbesar di masing-masing provinsi. Data ini juga dilengkapi melalui FGD dan Wawancara Mendalam. Sekalipun demikian sering muncul kritik bahwa data IDI under coverage, karena hanya bertumpu pada satu koran. FGD dan WM yang digunakan untuk melengkapi juga memiliki keterbatasan peserta dan nara sumber. Masukan yang muncul umumnya menyarankan IDI menggunakan lebih dari satu koran atau menambahkan data melalui portal berita *online*.

5. Rilis Hasil Pengukuran IDI yang Terlalu Lama

Prosedur pengumpulan data IDI yang menggunakan data kejadian mengharuskan proses pengolahan baru bisa dilakukan setelah satu tahun indeks selesai. Proses kerja yang digunakan juga cenderung panjang dan harus berurutan satu sama lain dalam artian FGD bisa dilakukan setelah data koran dan dokumen selesai. Demikian juga dengan wawancara mendalam, baru bisa dilakukan setelah FGD selesai. Sebagian besar data IDI juga berdasarkan kejadian sehingga memerlukan waktu lama untuk melakukan verifikasi. Kondisi ini membuat IDI baru bisa dirilis pada bulan Agustus setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan respon pemerintah pada permasalahan demokrasi berpotensi terlambat. IDI diharapkan bisa dirilis lebih cepat sehingga tetap aktual dengan kondisi yang terjadi di masyarakat.

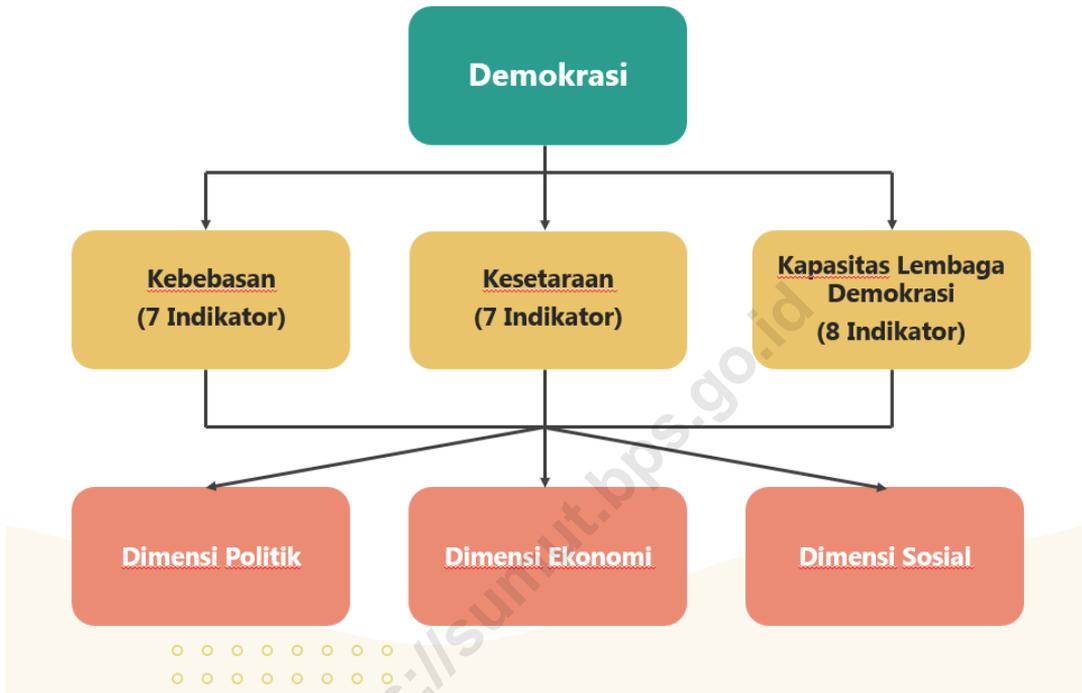
Aspek dan Indikator IDI Metode Baru

Demonopolisasi merupakan konsep dasar dalam riset indeks demokrasi Indonesia (IDI) metode baru yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusivitas) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Merujuk Diagram 1 di bawah maka jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut. Dengan metode baru sekarang ini akan diperoleh tiga nilai indeks:

- Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut provinsi
- Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru



Gambar 1 Aspek dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru

1.3 Aspek Kebebasan

Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial, yaitu:

Tabel 1 Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KEBEBASAN	1. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.	Politik
	2. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.	Politik
	3. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan.	Sosial
	4. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan.	Politik
	5. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.	Politik
	6. Pemenuhan hak-hak pekerja.	Ekonomi
	7. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.	Politik, Ekonomi, dan Sosial

1.4 Aspek Kesetaraan

Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya. Aspek kesetaraan diukur dari 7 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial

Tabel 2

Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KESETARAAN	8. Kesetaraan gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial
	9. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik
	10. Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi
	11. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	Ekonomi
	12. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	Ekonomi
	13. Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik
	14. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial

1.5 Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas demokrasi diukur dari 8 indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial

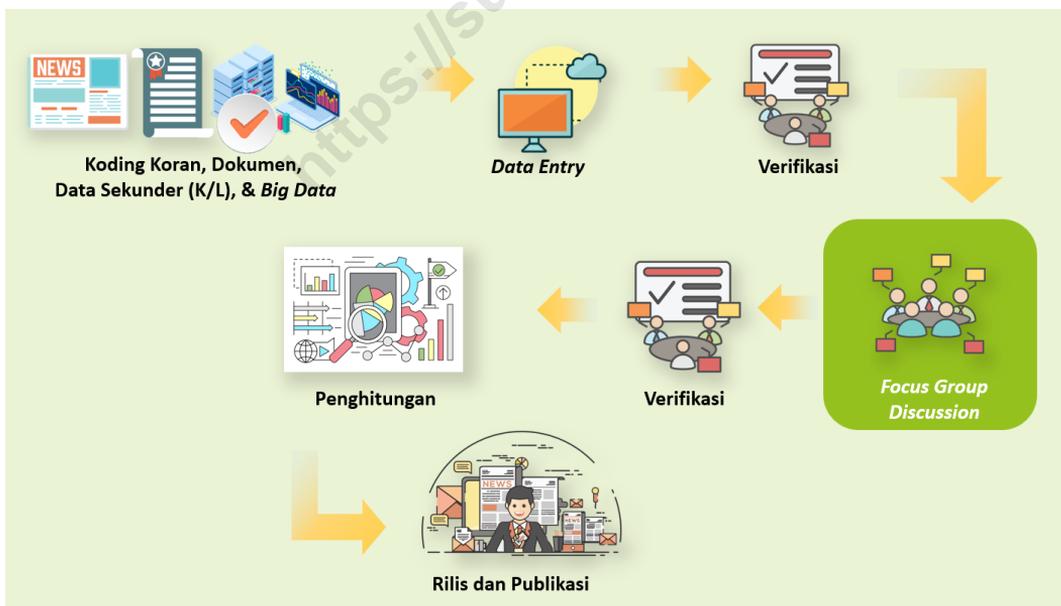
Tabel 3
Indikator-Indikator Penyusun Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Indeks Demokrasi Indonesia

ASPEK	INDIKATOR	DIMENSI
KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	15.Kinerja Lembaga Legislatif	Politik
	16.Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik
	17.Neutralitas Penyelenggara Pemilu	Politik
	18.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik
	19.Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial
	20.Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	Politik
	21.Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik
	22.Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik

1.3 METODE PENGUMPULAN DATA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan ini bermanfaat bagi ilmuwan sosial untuk memperlihatkan kepercayaan yang lebih besar pada temuan mereka *Webb et al* (dalam Bryman, 1988: 130).

Data kuantitatif dikumpulkan melalui penelusuran kejadian di koran cetak serta portal berita *online*, data sekunder, serta indeks yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Data tersebut divalidasi dalam FGD yang melibatkan ahli yang relevan. Dalam FGD ada tiga hal utama yang menjadi tujuan, yaitu konfirmasi, klarifikasi (koreksi), serta eksplorasi data baru yang belum tercakup dalam data kuantitatif. Validasi silang juga akan dilakukan pada data-data yang ada di FGD dengan menggunakan data kuantitatif yang tersedia. FGD akan dipimpin oleh fasilitator yang merupakan Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Provinsi. Peserta FGD merupakan perwakilan pemerintah, aparat keamanan, universitas, pers, tokoh masyarakat, serta LSM. Metode penyusunan IDI bisa dilihat melalui ilustrasi berikut:



Gambar 2 Skema Penyusunan IDI

Review Media dan Review Dokumen

Review media dan review dokumen resmi K/L/D/I merupakan pengumpulan data kuantitatif. Surat kabar cetak dan portal berita online dipilih karena media tersebut merupakan sumber informasi yang menangkap berbagai fenomena demokrasi di masyarakat. Sumber ini memiliki keunggulan karena keteraturan penerbitan sehingga bisa menggambarkan fenomena tersebut dalam satu tahun penuh. Dokumen dan data resmi K/L/D/I merupakan data sekunder yang relevan dengan indikator tertentu yang diukur. Sumber ini dipilih karena memiliki validitas tinggi karena merupakan data resmi, serta mampu memberikan gambaran makro/menyeluruh terhadap sebuah fenomena dalam satu tahun pengukuran. Koran yang digunakan adalah koran dengan oplah terbesar yang ada di sebuah provinsi. Pengecualian jika koran tersebut memiliki segmen yang spesifik (misal ekonomi, atau kriminalitas) sehingga tidak banyak memuat berita-berita yang bersifat umum.

Untuk data provinsi akan dikumpulkan oleh personel BPS Provinsi, sementara untuk data pusat dan nasional akan dikumpulkan oleh Fungsi Statistik Politik dan Keamanan di BPS RI. Dalam pengumpulan data BPS dibantu oleh Pokja IDI provinsi, yaitu lembaga yang berisikan instansi terkait data IDI, akademisi, jurnalis, serta organisasi kemasyarakatan. Dalam proses verifikasi, jika tim BPS membutuhkan pandangan dari pihak lain akan mengundang penghasil data, atau pakar dalam bidang terkait.

Tim Koordinasi IDI Pusat

Pengumpulan data IDI diorganisir oleh tim koordinasi IDI pusat yang dipimpin Kemenkopluhukam dengan anggota BPS, Bappenas, dan Kemendagri. Tim ini yang melakukan koordinasi dalam pengumpulan data yang dimiliki oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk kemudian datanya dikelola oleh BPS. Tim ini juga melakukan verifikasi data yang akan dihitung dalam IDI. Dalam ranah pemanfaatan data IDI, tim ini juga berbagi peran dalam menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari penghitungan IDI. Tindak lanjut tersebut berupa koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah yang terkait langsung dengan hasil IDI, maupun melakukan sosialisasi dalam rangka penguatan demokrasi.

Pokja IDI Provinsi

Pada tingkat provinsi tim yang mengemban peran serupa dengan tim koordinasi IDI pusat disebut kelompok kerja (Pokja) IDI Provinsi. Secara nasional Pokja IDI dikoordinir oleh Kemendagri. Pokja akan diketuai oleh sekdaprov dengan beranggotakan dinas yang terkait IDI, BPS, Kantor Perwakilan Komnas HAM, Komisi Informasi Provinsi, LMS, perguruan tinggi, serta pers. Masa keanggotaan pokja IDI metode baru mengikuti jabatan gubernur agar selaras dengan RPJMD pada bidang politik dan demokrasi. Pada pegumpulan data pokja membantu mengakses data-data pemerintah seperti transparansi anggaran, pendidikan politik, serta data DPRD. Sebagaimana di pusat, data yang diperoleh melalui pokja akan dikelola oleh BPS Provinsi. Dalam ranah pemanfaatan, pokja IDI provinsi juga mengemban amanat untuk melakukan koordinasi pada dinas/pihak terkait berdasarkan hasil IDI, serta melakukan sosialisasi dalam rangka penguatan demokrasi.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD merupakan tahapan pengumpulan data kualitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan validasi silang data kuantitatif yang sudah dikumpulkan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
2. Melakukan eksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
3. Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen.
4. Sosialisasi indikator-indikator yang digunakan dalam IDI yang angkanya sudah dihasilkan oleh kementerian/lembaga.

Untuk tujuan (1) FGD yaitu verifikasi, konfirmasi, dan diskonfirmasi dilakukan untuk semua indikator. Sementara itu, untuk tujuan eksplorasi dan menggali informasi dilakukan pada indikator tertentu.

Peserta FGD IDI diharapkan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Tabel 4
Peserta *Focus Group Discussion* IDI

No	Peserta	Kuota	Kriteria
1	Wartawan Koran	2 orang	Satu orang berasal dari koran yang digunakan sebagai sumber data IDI dan satu orang berasal koran yang lain (terbesar kedua di provinsi)
2	Pejabat Bakesbangpol	1 orang	Memahami pendidikan politik pada kader partai politik
3	Pejabat Biro Hukum	1 orang	Memahami aturan-aturan yang dicatat dalam indikator-indikator IDI
4	Pejabat Bappeda	1 orang	Memahami informasi APBD yang perlu diunggah di website Pemda
5	Sekretariat DPRD	1 orang	Memahami tentang kegiatan hearing, audiensi, RDP umum, uji publik atau kegiatan penyerapan aspirasi lain yang pernah berlangsung
6	Partai Politik	2 orang	Parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi
7	Aparat Keamanan	1 orang	Personel Polda
8	Aktivis LSM	3 orang	Kriteria: Tokoh LSM/Ormas yang aktif
9	Akademisi dan Peneliti	2 orang	Dosen/peneliti yang sering menjadi narasumber bidang (1) sosial politik, (2) hukum dan HAM, atau (3) ekonomi
10	Tokoh Ormas Keagamaan	1 orang	NU, Muhammadiyah, dll.
11	Organisasi Mahasiswa	1 orang	GMNI, HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KAMMI, BEM, dll.
12	Tokoh lainnya	4 orang	Figur yang dianggap penting untuk terlibat dalam FGD

Sumber Data IDI Provinsi

Data Indeks Demokrasi Indonesia dikumpulkan dari berbagai sumber, yang berbeda untuk setiap indikatornya, yang secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5
Sumber Data Indeks Demokrasi Indonesia

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KEBEBASAN						
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	Politik	√	√	√	√
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	Politik	√	√	√	√
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	Sosial	√	√	√	√
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	Politik			√	√
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	Politik			√	
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	Ekonomi			√	
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Politik, Ekonomi, dan Sosial			√	

Lanjutan Tabel 5

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KESETARAAN						
8	Kesetaraan Gender	Politik, Ekonomi, dan Sosial			√	
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	Politik	√	√	√	√
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	Ekonomi			√	
11	Akses masyarakat pada Jaminan sosial dan perlindungan bagi warga miskin	Ekonomi			√	
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	Ekonomi			√	
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	Politik			√	
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	Sosial			√	

Lanjutan Tabel 5

No	Indikator Baru	Dimensi	Sumber Data			
			Koran Cetak	Portal Berita Online	Dokumen	FGD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI						
15	Kinerja Lembaga Legislatif	Politik	√	√	√	√
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	Politik			√	
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	Politik			√	
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	Politik			√	
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	Politik dan Sosial			√	
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	Politik			√	√
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	Politik			√	
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	Politik	√	√	√	√

Catatan: dikumpulkan provinsi

1.4 MAKNA NILAI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki rentang nilai dari 0 - 100, dimana semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik.

Tabel 6

Makna Nilai Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks	Makna
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
< 60	KINERJA DEMOKRASI RENDAH
60–80	KINERJA DEMOKRASI SEDANG
> 80	KINERJA DEMOKRASI TINGGI

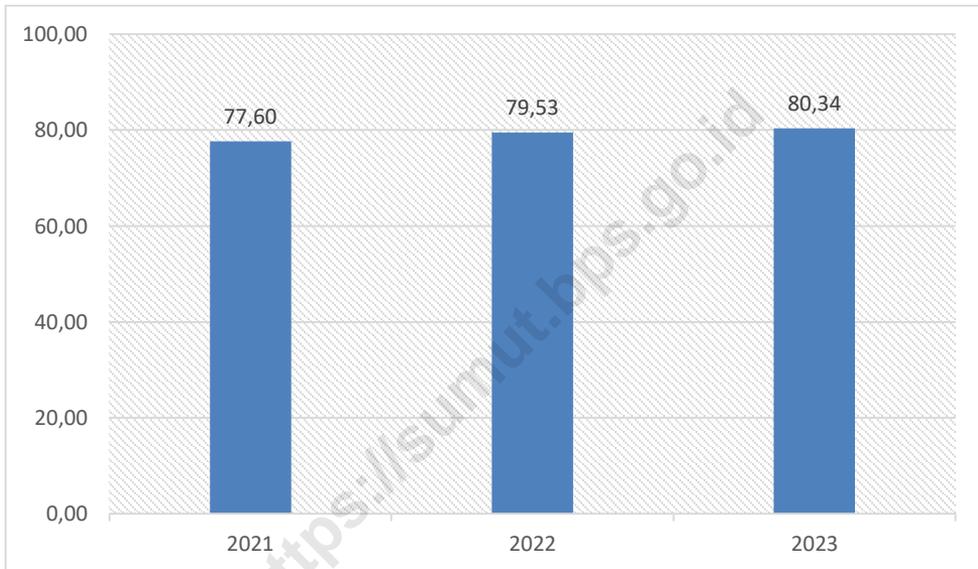
2

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Utara

2.1 PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) SUMATERA UTARA, 2021-2023

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2023 mencapai 80,34 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2022 yang sebesar 79,53, dan berhasil mencapai kategori “Tinggi”.

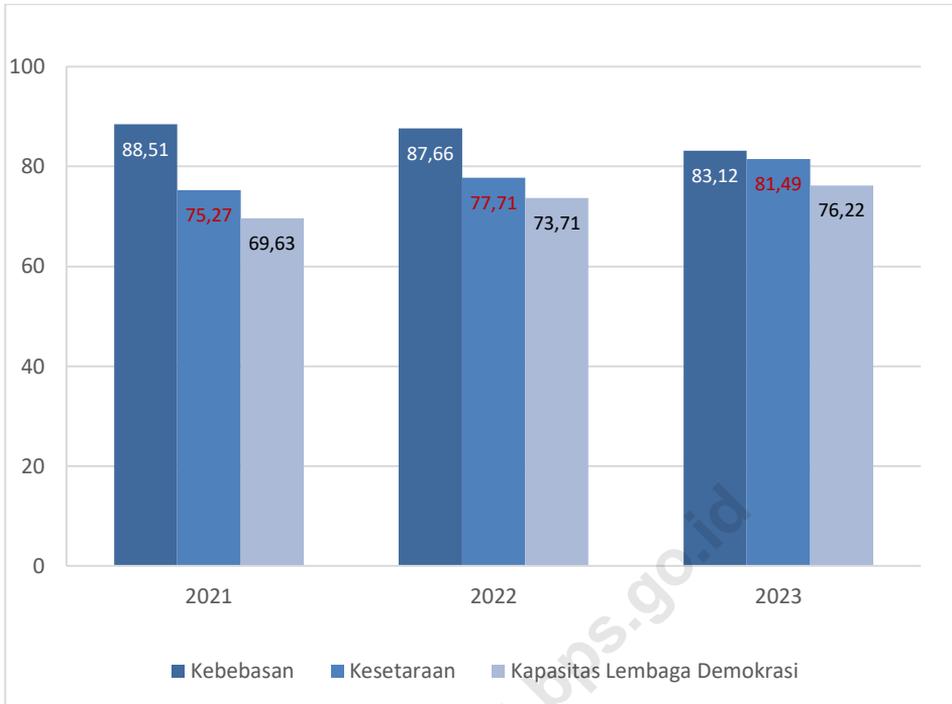
Capaian IDI dari tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, capaian IDI Sumatera Utara sebesar 77,60, naik menjadi 79,53 pada tahun 2022 dan kembali naik sebesar 0,81 poin menjadi 80,34.



Gambar 3 Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2021–2023

2.2 PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK IDI SUMATERA UTARA, 2021-2023

Angka IDI Sumatera Utara 2023 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek Kebebasan dengan nilai indeks 83,12; aspek Kesetaraan 81,49; dan aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 76,22.

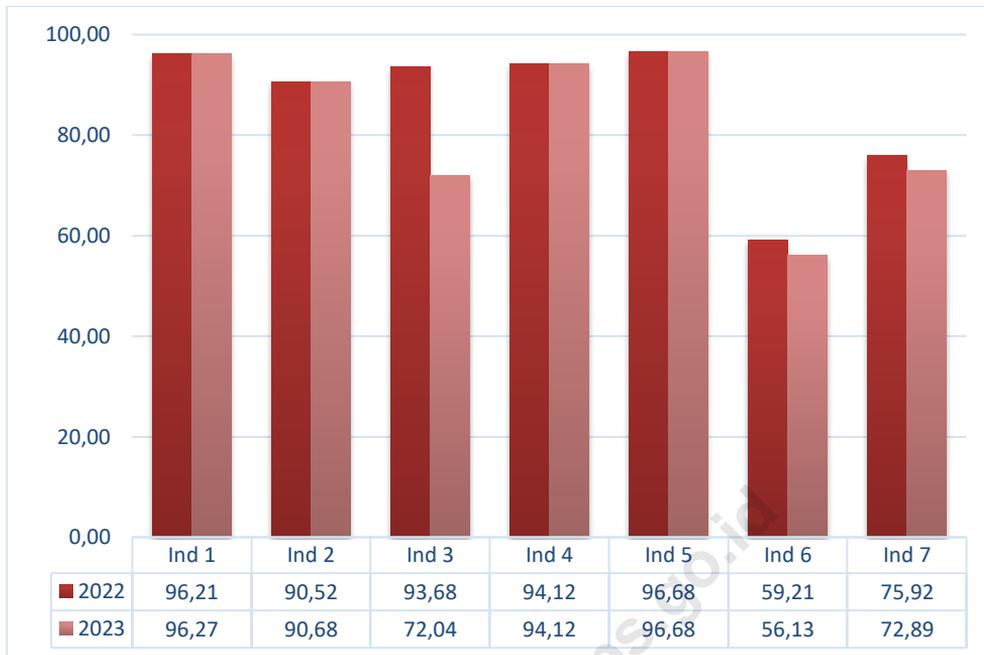


Gambar 4 Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2021–2023

Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2021–2023 dengan Indikator pembentuknya

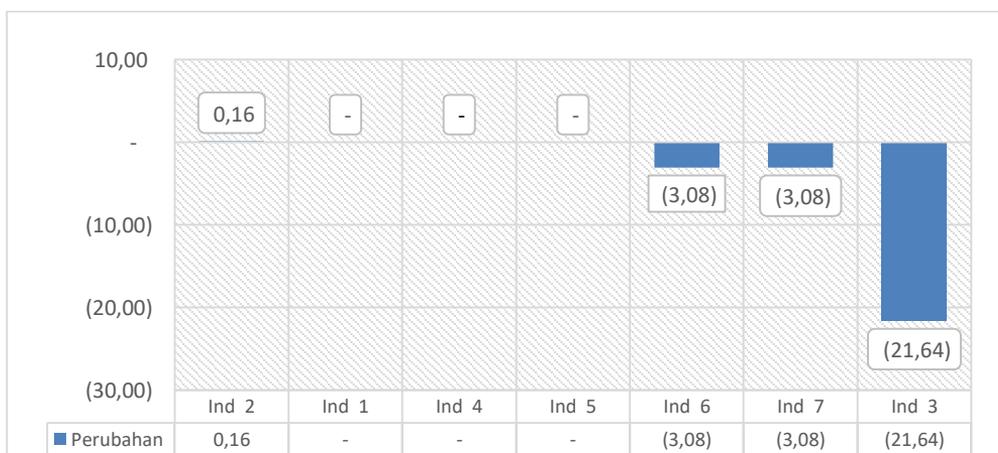
Aspek Kebebasan dibentuk dari 7 indikator, ketujuh indikator tersebut adalah:

- Indikator 1 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara.
- Indikator 2 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat
- Indikator 3 : Terjaminnya kebebasan berkeyakinan
- Indikator 4 : Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan
- Indikator 5 : Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu
- Indikator 6 : Pemenuhan hak-hak pekerja
- Indikator 7 : Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya



Gambar 5 Nilai Indeks pada Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2022 dan 2023

Pada tahun 2023, Aspek Kebebasan turun sebesar 4,54 poin menjadi 83,12 pada 2023. Turunnya nilai pada aspek ini dipengaruhi oleh tiga indikator, yang turun cukup drastis sebesar 21,64 poin adalah indikator Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan (indikator 3) berikutnya indikator Pemenuhan Hak-hak Pekerja (indikator 6) sebesar 3,08 point terakhir indikator Pers yang Bebas dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya (indikator 7) sebesar 3.03 point.



Gambar 6 Perubahan Indeks Aspek Kebebasan IDI Sumatera Utara 2022–2023

Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2022 – 2023 dengan Indikator pembentuknya

Aspek Kesetaraan dibentuk dari 7 indikator, ketujuh indikator sebut adalah

Indikator 8 : Kesetaraan gender

Indikator 9 : Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan

Indikator 10 : Anti monopoli sumber daya ekonomi

Indikator 11 : Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial

Indikator 12 : Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah

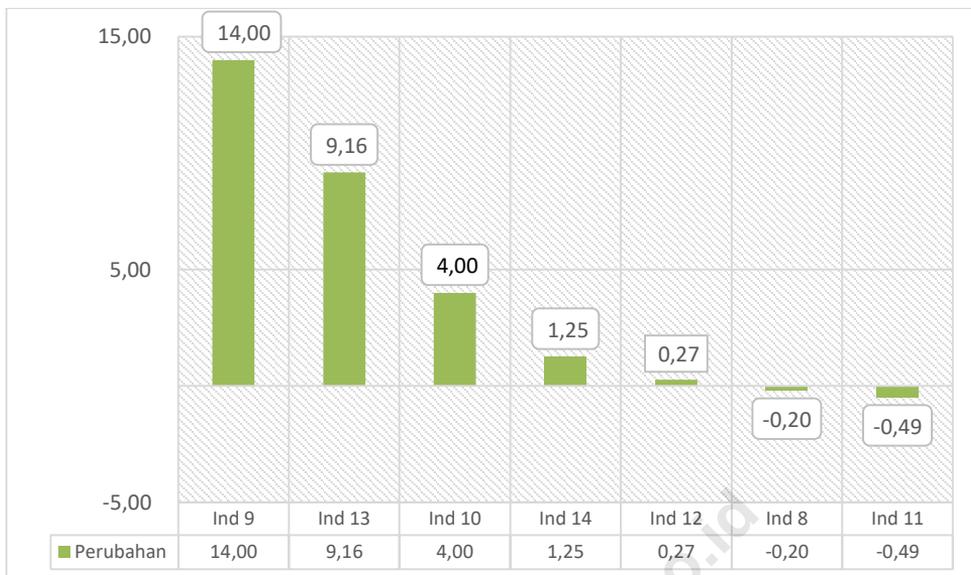
Indikator 13 : Akses masyarakat terhadap informasi publik

Indikator 14 : Kesetaraan dalam pelayanan dasar



Gambar 7 Nilai Indeks pada Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2022–2023

Tahun 2023 Aspek Kesetaraan termasuk dalam kategori Tinggi, yang mana pada tahun sebelumnya, tahun 2022 masih berada pada kategori Sedang. Aspek ini meningkat 3,78 poin dari 77,71 pada tahun 2022 menjadi 81,49 pada tahun 2023. Pada Aspek Kebebasan ini ada lima Indikator pembentuknya mengalami peningkatan, yaitu indikator 9 naik 14,00 poin , indikator 13 naik 9,16 poin, indikator 10 naik 4,00 poin, indikator 14 naik 1,25 poin dan indikator 12 naik 0,27 poin. Dua indikator lainnya mengalami penurunan yaitu indikator 8 turun sebesar 0,20 poin dan indikator 11 turun sebesar 0,49 poin.



Gambar 8 Perubahan Indeks Aspek Kesetaraan IDI Sumatera Utara 2021–2022

Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara 2021–2022 dengan Indikator pembentuknya

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi dibentuk dari 8 indikator, kedelapan indikator tersebut adalah

Indikator 15 : Kinerja lembaga legislatif

Indikator 16 : Kinerja lembaga yudikatif

Indikator 17 : Netralitas penyelenggara pemilu

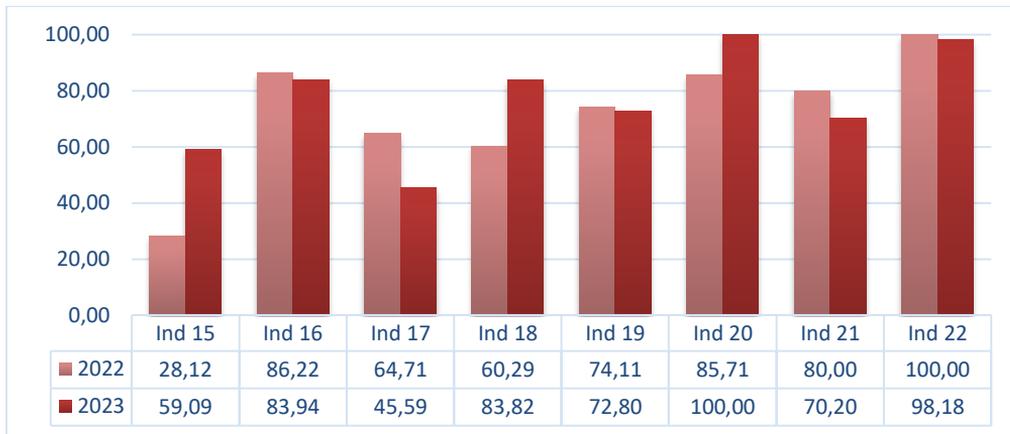
Indikator 18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah

Indikator 19 : Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat

Indikator 20 : Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah

Indikator 21 : Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik

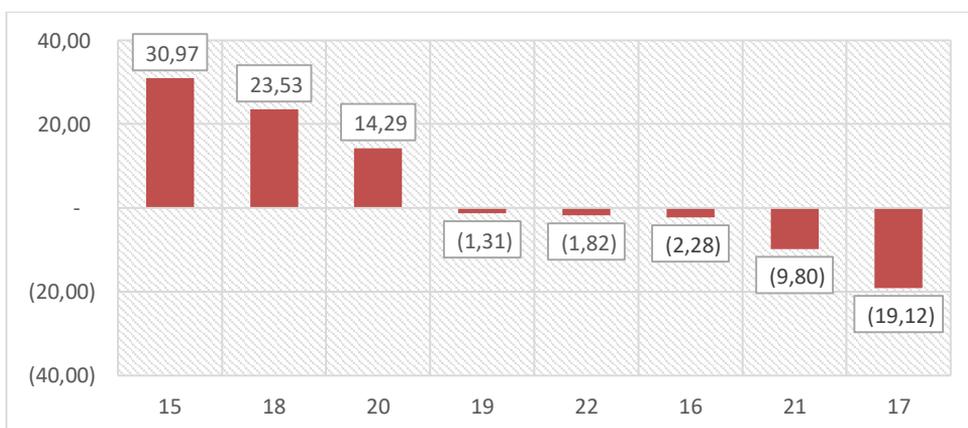
Indikator 22 : Pendidikan politik pada kader partai politik



Gambar 9 Nilai Indeks pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara, 2022–2023

Tahun 2023 Aspek Lembaga Demokrasi masih berada pada level sedang dengan nilai 76,22 poin. Dibandingkan dengan tahun 2022, Aspek ini mengalami kenaikan sebesar 2,51 poin. Kenaikan nilai pada Aspek ini berasal dari tiga indikator, yaitu indikator 15. Kinerja Lembaga Legislatif (naik 30,97 poin), Indikator 18. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait kebijakan pejabat pemerintah (naik 23,53 poin), dan indikator 20. Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah (naik 14,29 poin)

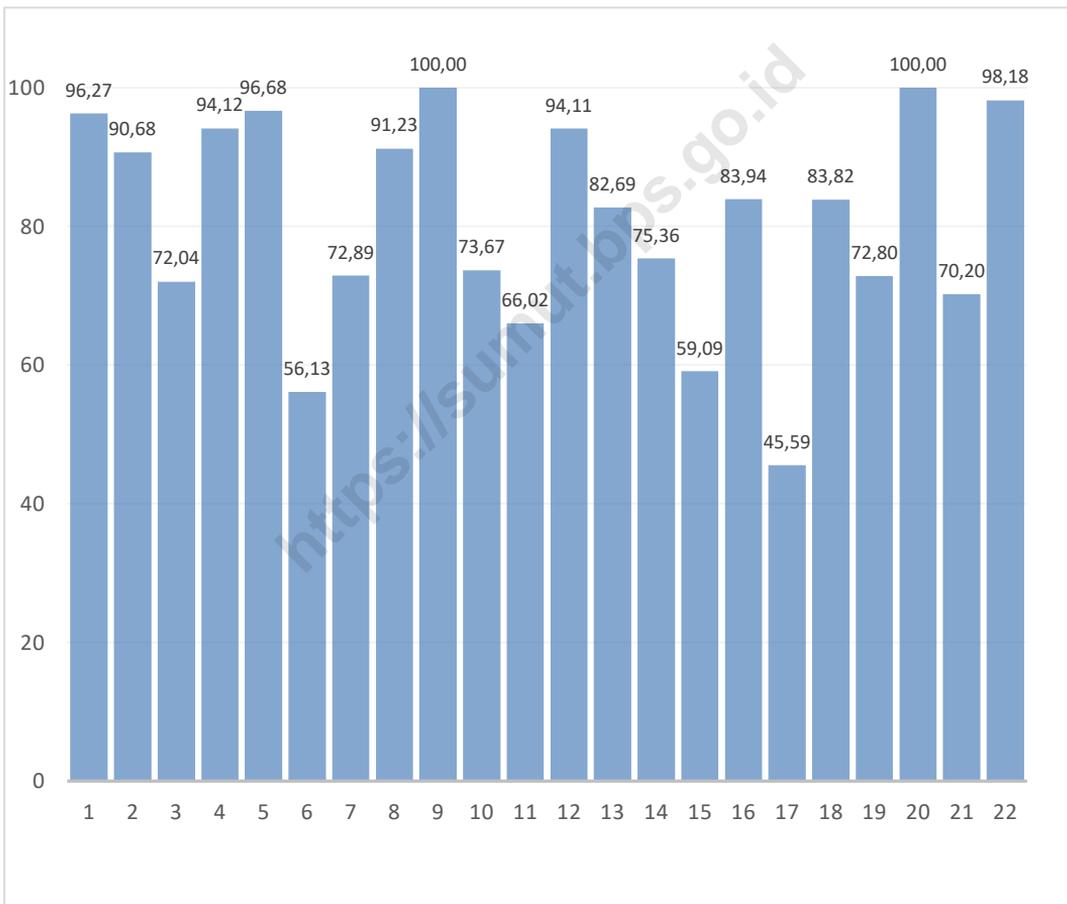
Sementara itu, lima indikator lainnya mengalami penurunan, yaitu Indikator 19 turun 1,31 poin; indikator 22 turun 1,82 poin, indikator 16 turun 2,23 poin, indikator 21 turun 9,8 poin dan indikator 17 turun 19,12 poin.



Gambar 10 Perubahan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi IDI Sumatera Utara, 2022–2023

2.3 CAPAIAN SKOR INDIKATOR IDI SUMATERA UTARA 2023

Nilai Indeks indikator IDI 2023 Sumatera Utara tertinggi ada pada indikator 20 Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah dan indikator 9 Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, masing-masing sebesar 100 poin, sementara yang terendah pada indikator 17 yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu sebesar 45,59 poin. Berikut grafik nilai indek indikator IDI Sumatera Utara tahun 2023:



Gambar 11 Indeks Indikator IDI Sumatera Utara 2023

Tabel 7
Indeks Indikator IDI Sumatera Utara, 2023

No	Indeks Indikator	2023
(1)	(2)	(3)
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	96,27
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	90,68
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	72,04
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	94,12
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	96,68
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	56,13
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	72,89
8	Kesetaraan gender	91,23
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,02
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	94,11
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	82,69
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	75,36
15	Kinerja lembaga legislatif	59,09
16	Kinerja lembaga yudikatif	83,94
17	Netralitas penyelenggara pemilu	45,59
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	83,82
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	72,80
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	100,00
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	70,20
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	98,18

- **Indikator dengan Kinerja Baik**

Dari 22 indikator pada IDI Sumatera Utara terdapat 12 indikator masuk pada kategori Baik, dari capaian tertinggi sampai terendah. Indikator dengan capaian tertinggi yaitu Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (indikator 9) dan Indikator Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah (indikator 20) keduanya dengan skor 100 poin. Indikator dengan capaian terendah adalah Akses masyarakat terhadap informasi publik (indikator 13) 82.69 poin.

Tabel 8 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Tinggi, 2023

Indikator dengan kinerja baik		2023
(1)	(2)	(3)
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	98,18
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	96,68
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	96,27
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	94,12
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	94,11
8	Kesetaraan Gender	91,23
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	90,68
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	83,94
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	83,82
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	82,69

- **Indikator dengan Kinerja Sedang**

Dari 22 indikator pada IDI Sumatera Utara terdapat 8 indikator masuk pada kategori Sedang dari capaian tertinggi sampai terendah. Indikator dengan capaian tertinggi adalah indikator Kesetaraan dalam pelayanan dasar (indikator 14) 75,36 poin. Dan terendah adalah indikator Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial (indikator 11) 66,02 poin.

Tabel 9 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Sedang, 2023

Indikator dengan kinerja sedang		2023
(1)	(2)	(3)
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	75,36
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,67
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	72,89
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	72,80
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	72,04
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	70,20
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,02

- **Indikator dengan Kinerja Buruk**

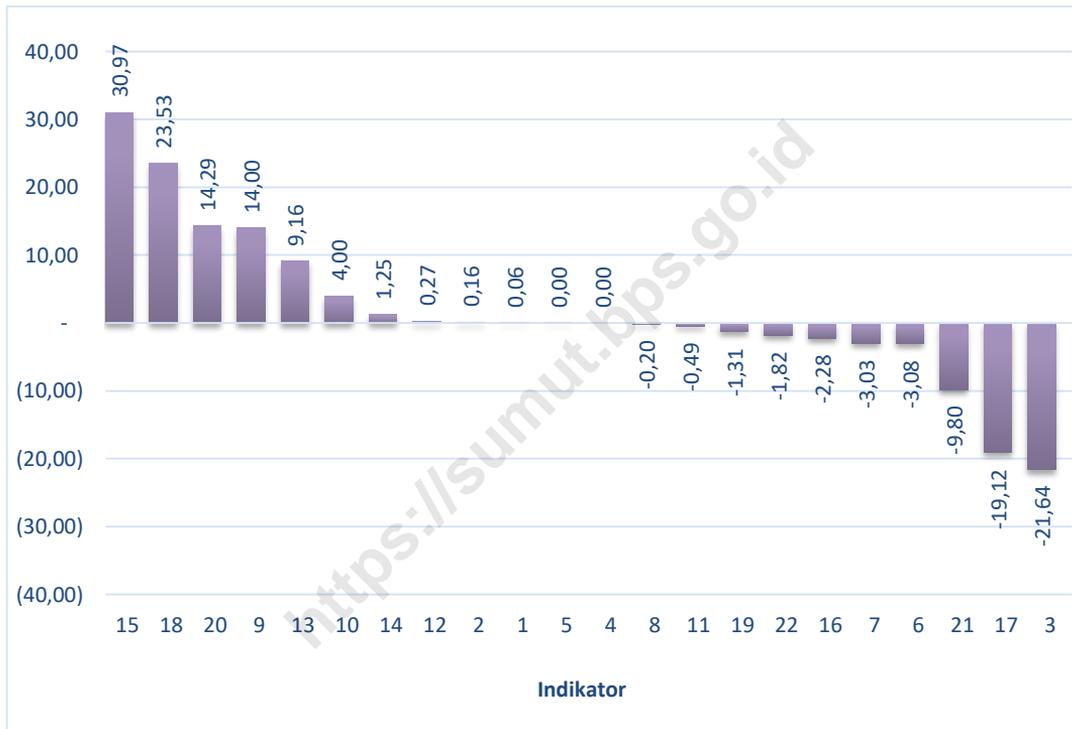
Terdapat 3 indikator masuk pada kategori Buruk, Kinerja Lembaga Legislatif (indikator 15) sebesar 59,09 poin dan kinerja terburuk ada pada indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu (17) sebesar 45,59 poin

Tabel 10 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Rendah, 2023

Indikator dengan kinerja buruk		2023
(1)	(2)	(3)
15	Kinerja Lembaga Legislatif	59,09
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	56,13
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	45,59

2.4 PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR PADA INDEKS DEMOKRASI INDONESIA SUMATERA UTARA 2022-2023

Jika dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator pembentuk Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, terdapat 10 indikator yang mengalami kenaikan dan ada 10 indikator yang mengalami penurunan, sementara dua indikator lainnya tidak mengalami perubahan.



Gambar 12 Nilai Perubahan Indikator IDI Sumatera Utara (poin), 2022–2023

Tabel 11 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Naik

Indikator dengan kinerja naik		Besar Perubahan (poin)
(1)	(2)	(3)
15	Kinerja Lembaga Legislatif	30,97
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	23,53
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	14,29
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	14,00
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	9,16
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	4,00
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	1,25
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	0,27
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	0,16
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	0,06

Tabel 12 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Turun

Indikator dengan kinerja turun		Besar Perubahan (poin)
(1)	(2)	(3)
8	Kesetaraan Gender	-0,20
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	-0,49
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	-1,31
22	Pendidikan Politik pada kader partai politik	-1,82
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	-2,28
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	-3,03
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	-3,08
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	-9,80
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	-19,12
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	-21,64

Tabel 13 Indikator IDI 2023 Sumatera Utara dengan Kinerja Tetap

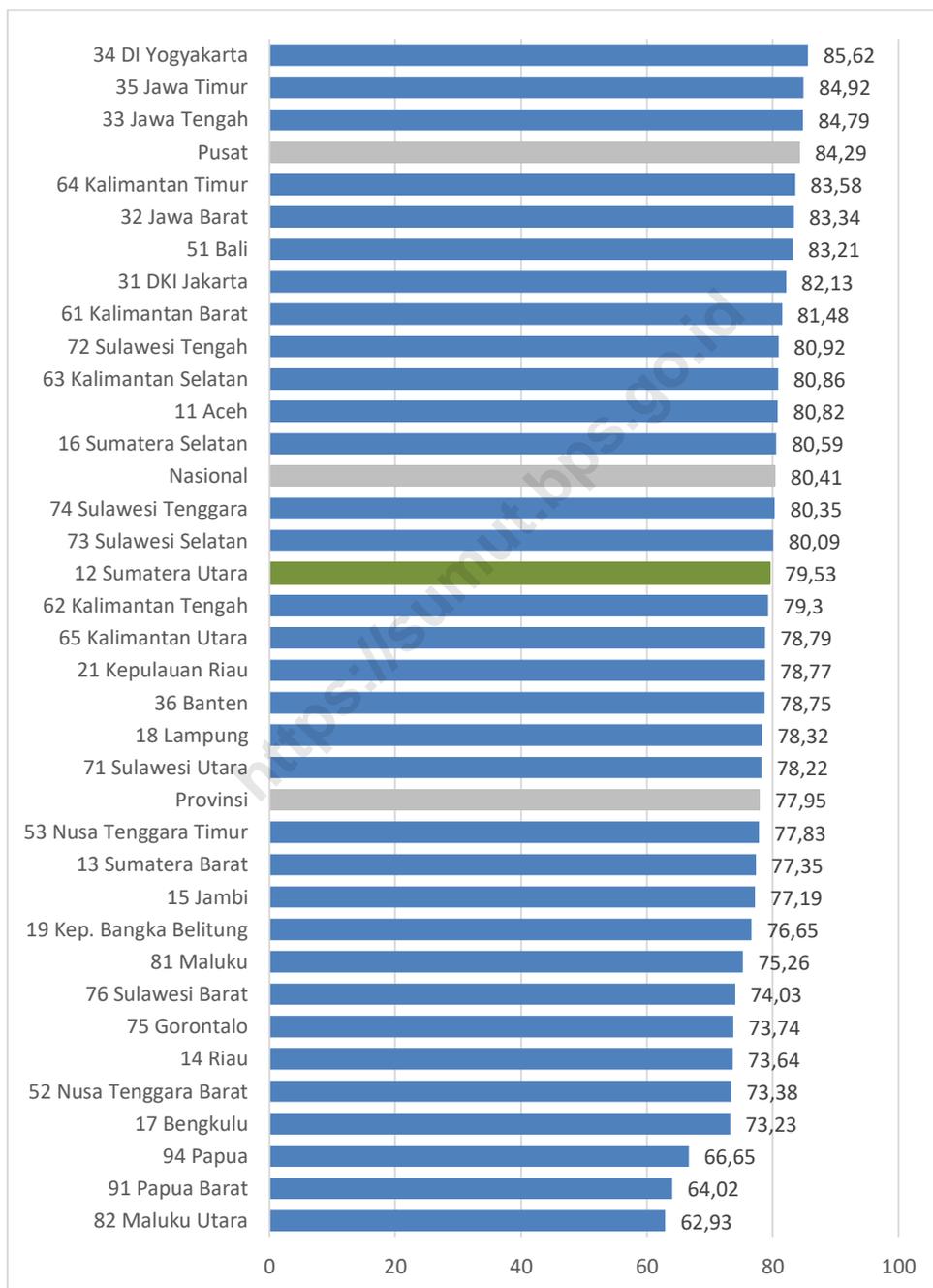
Indikator dengan kinerja turun		Besar Perubahan (poin)
(1)	(2)	(3)
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	0
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0

3

Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi

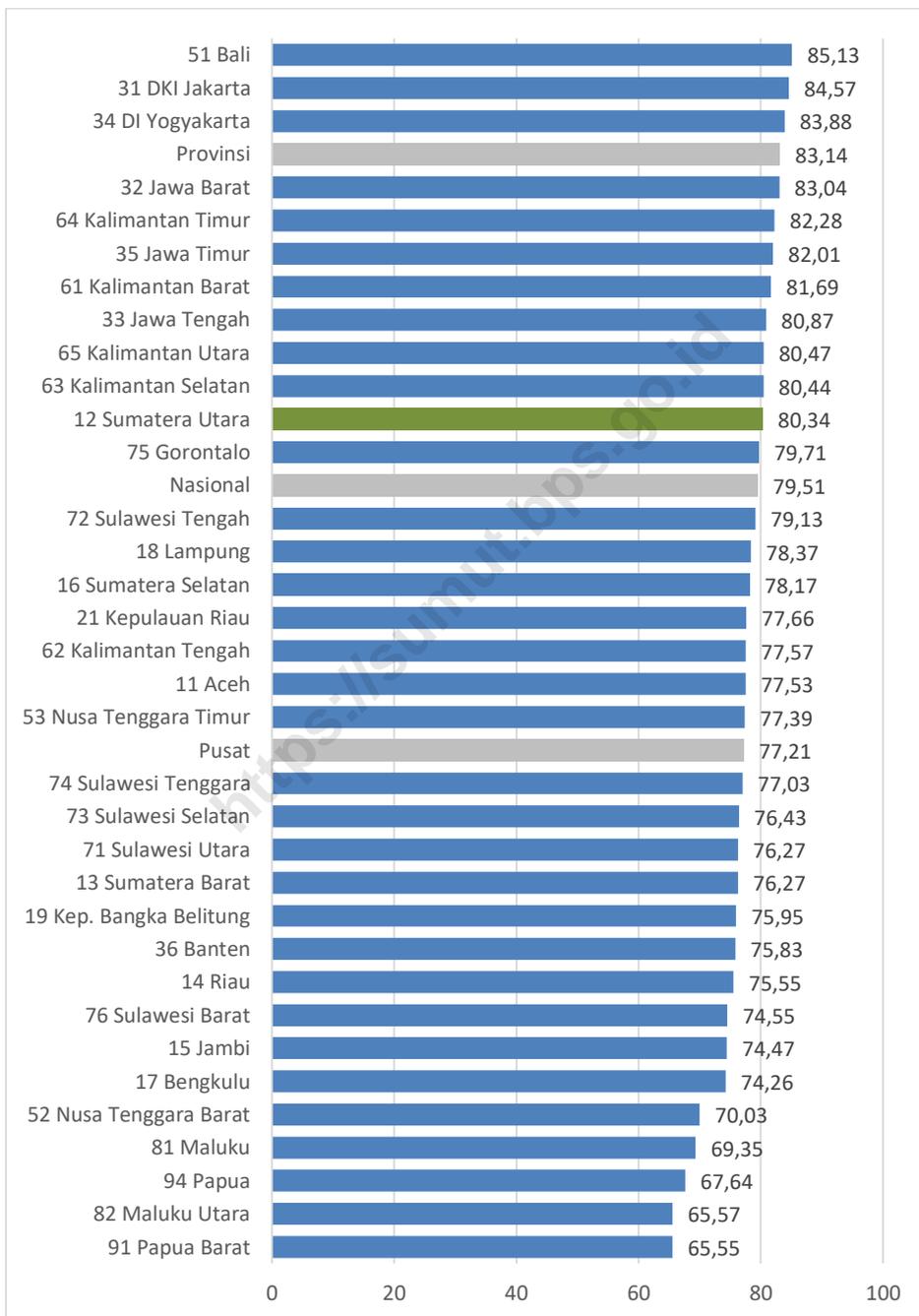
PERBANDINGAN ANGKA IDI 2022 DAN 2023 SECARA NASIONAL

Pada tahun 2022, IDI Provinsi Sumatera Utara berada pada urutan ke-15 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan nilai indeks 79,53 dan termasuk dalam kategori “Sedang”.



Gambar 11 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi (poin), 2022

Pada tahun 2023, IDI Provinsi Sumatera Utara berhasil naik ke urutan ke-11 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan nilai indeks 80,34 sehingga kategorinya juga berubah menjadi berkategori “Tinggi”.



Gambar 12 Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di 34 Provinsi (poin), 2023

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Teknis Indeks Demokrasi Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik – RI.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Pedoman Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik – RI.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2022. *Indeks Demokrasi Indonesia 2021 Tantangan Konsolidasi Demokrasi Menjelang Pemilu 2024*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Naskah Akademik Revisi Indeks Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik – RI.

<https://sumut.bps.go.id>

<https://keumut.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2022–2023 berdasarkan Aspek dan Provinsi

Provinsi	IDI		Aspek					
			Kebebasan		Kesetaraan		Kapabilitas Lembaga Demokrasi	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
11 Aceh	80,82	77,53	84,66	85,71	80,10	74,47	77,90	73,12
12 Sumatera Utara	79,53	80,34	87,66	83,12	77,71	81,49	73,71	76,22
13 Sumatera Barat	77,35	76,27	78,01	72,15	79,85	81,48	73,69	74,09
14 Riau	73,64	75,55	84,46	79,39	70,53	80,13	66,69	66,30
15 Jambi	77,19	74,47	77,13	65,28	74,04	76,91	81,01	80,61
16 Sumatera Selatan	80,59	78,17	86,78	80,94	80,86	82,14	74,15	70,68
17 Bengkulu	73,23	74,26	68,95	74,62	81,29	79,27	67,81	67,91
18 Lampung	78,32	78,37	79,90	73,79	79,37	80,48	75,52	80,36
19 Kep. Bangka Belitung	76,65	75,95	66,36	68,34	78,11	78,98	85,05	79,83
21 Kepulauan Riau	78,77	77,66	88,34	79,72	76,05	78,82	72,60	74,25
31 DKI Jakarta	82,13	84,57	87,39	90,66	85,34	86,51	73,12	76,24
32 Jawa Barat	83,34	83,04	90,61	87,97	82,61	83,63	77,05	77,49
33 Jawa Tengah	84,79	80,87	88,83	85,84	82,73	80,24	83,25	76,73
34 DI Yogyakarta	85,62	83,88	87,35	77,76	88,76	89,21	80,17	83,51
35 Jawa Timur	84,92	82,01	88,48	87,29	82,12	83,24	84,77	75,34
36 Banten	78,75	75,83	83,80	83,11	80,84	80,59	71,27	62,96
51 Bali	83,21	85,13	85,78	85,23	83,90	85,75	79,83	84,28
52 Nusa Tenggara Barat	73,38	70,03	76,75	64,49	77,24	79,26	65,44	64,46
53 Nusa Tenggara Timur	77,83	77,39	89,06	90,05	74,43	75,66	70,83	66,97
61 Kalimantan Barat	81,48	81,69	91,35	92,16	78,58	78,55	75,23	75,13
62 Kalimantan Tengah	79,30	77,57	82,05	82,01	77,61	77,66	78,62	73,07
63 Kalimantan Selatan	80,86	80,44	80,70	81,4	80,86	82,6	81,01	76,92
64 Kalimantan Timur	83,58	82,28	91,40	83,00	79,25	81,08	81,06	83,00
65 Kalimantan Utara	78,79	80,47	77,93	84,59	80,88	81,24	77,13	75,48
71 Sulawesi Utara	78,22	76,27	77,76	78,15	82,80	78,09	73,20	72,25
72 Sulawesi Tengah	80,92	79,13	81,69	87,11	81,51	74,78	79,46	76,48
73 Sulawesi Selatan	80,09	76,43	83,39	81,70	86,09	79,52	69,66	67,53
74 Sulawesi Tenggara	80,35	77,03	87,49	71,72	85,83	87,06	66,74	70,27
75 Gorontalo	73,74	79,71	65,31	81,68	82,21	83,32	71,92	73,43
76 Sulawesi Barat	74,03	74,55	67,78	74,87	83,46	81,68	68,90	65,72
81 Maluku	75,26	69,35	74,49	70,55	79,72	77,6	70,69	58,31
82 Maluku Utara	62,93	65,57	70,84	65,58	66,83	74,84	50,47	54,47
91 Papua Barat	64,02	65,55	53,64	72,89	74,47	72,52	61,77	49,96
94 Papua	66,65	67,64	67,23	79,98	67,85	60,10	64,63	64,50
Nasional*	80,41	79,51	82,80	77,48	80,28	83,74	78,22	78,48
Pusat	84,29	83,14	86,59	74,32	81,47	90,12	85,39	79,67
Provinsi**	77,95	77,21	80,39	79,50	79,52	79,67	73,66	72,00

*Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional merupakan agregasi dari nilai Provinsi dan Pusat

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi

Lampiran 2 Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Aspek, dan Indikator 2022–2023

ASPEK / INDIKATOR		2022	2023
	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA SUMATERA UTARA	79,53	80,34
A.	ASPEK KEBEBASAN	87,66	83,12
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	96,21	96,27
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	90,52	90,68
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	93,68	72,04
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	94,12	94,12
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	96,68	96,68
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,21	56,13
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	75,92	72,89
B.	ASPEK KESETARAAN	77,71	81,49
8	Kesetaraan gender	91,43	91,23
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	86,00	100,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	69,67	73,67
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	66,51	66,02
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	93,84	94,11
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	73,53	82,69
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	74,11	75,36
C.	ASPEK KAPASITAS LEMBAGA DEMOKRASI	73,71	76,22
15	Kinerja lembaga legislatif	28,12	59,09
16	Kinerja lembaga yudikatif	86,22	83,94
17	Netralitas penyelenggara pemilu	64,71	45,59
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	60,29	83,82
19	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,11	72,80
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	85,71	100,00
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	80,00	70,20
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	100,00	98,18

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISSN 2620-5696



9 772620 569007